



RENCANA KERJA TAHUN 2023



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Dokumen Renja Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023 guna mendukung perencanaan tahunan daerah di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Jombang Tahun 2023.

Proses perencanaan pembangunan tahun 2023 di Kabupaten Jombang terus mengalami peningkatan baik secara manajemen maupun aplikasi di masyarakat, tuntutan perubahan terus kita respon secara positif sehingga mekanisme tahunan pemerintah Kabupaten Jombang yang telah berjalan dengan baik, selalu kita upayakan sebagai tindak lanjut pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal melalui program yang telah kita rencanakan khususnya dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.

Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang memuat tujuan, sasaran, perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang pada Tahun 2023 dengan melakukan evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya Renja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang menjadi landasan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kinerja aparatur Sekretariat DPRD dalam mengemban Amanah pembangunan di Kabupaten Jombang.

Hal - hal yang berkenan dengan Fasilitasi Kegiatan DPRD Kabupaten Jombang kami tuangkan dalam bentuk Rencana Kinerja, penjabarannya kami berpedoman pada Rencana Kegiatan Tahun 2023 dan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2023, sedangkan kegiatan kegiatan rutin yang melekat dalam tugas pokok fungsi Sekretariat DPRD kami

laksanakan guna menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan dalam bentuk pelayanan publik.

Harapan kami kepada seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, dalam melaksanakan tugas-tuganya berpedoman pada Rencana Kerja yang telah dibuat sehingga dapat berjalan lancar, terarah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2023 yang kami susun, semoga diberi kemampuan untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jombang, 17 Juli 2022
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JOMBANG



Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19680709 198903 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil, evaluasi pelaksanaan Renja tahun tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Dari hasil pengkajian dan evaluasi tersebut bisa dihindari kegagalan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga Program dan Kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang merupakan dokumen yang secara substansial menerjemakan visi, misi dan Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dilaksanakan dalam bentuk Program dan Kegiatan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.1. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang akan mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Pengertian Renja Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 227, telah mengamanatkan untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Perangkat Daerah setiap tahunnya terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah setiap lima 5 (lima) tahun. Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah “Bersama Mewujudkan Jombang berkarakter dan Berdaya Saing” Untuk mewujudkan visi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Selanjutnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD).

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, selanjutnya melakukan orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, aktivitas selanjutnya yaitu penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah serta menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan sub kegiatan alternatif dan/atau sub kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah terdiri dari analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dengan sistematika minimal sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Tahap selanjutnya yaitu Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyempurnaannya mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi sub kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKP. Sedangkan rumusan sub kegiatan alternatif dan/atau sub kegiatan baru

diajukan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD dan disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, maka Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Maka Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah. kemudian Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi kembali paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda.

Setelah Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Forum ini dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Tahap selanjutnya adalah Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. Tahap ini merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat

Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematisa rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Tahap terakhir penyusunan Renja adalah Penetapan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Verifikasi juga bertujuan untuk menemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi Bappeda, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, setelah disempurnakan rancangan akhir Renja disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



1.1 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang -undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang;

22. Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 050/9976/415.42/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 dan Renja PD Tahun 2023.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2023 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya serta sebagai dasar untuk mempermudah upaya pembinaan dan pemberdayaan, sehingga sasaran dan target capaian yang dilaksanakan di dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2023 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2023.
2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2023.
3. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah untuk :

1. Memberikan pedoman dalam menyusun rencana kerja pada masing-masing Bagian pada Sekretariat DPRD;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.

1.3 SISTEMATIKA RENJA

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika enulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka visi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah **“Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing”**.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional”.

Dalam mewujudkan arah kebijakan dan sasaran di dalam Renstra tersebut, telah direalisasikan ke dalam 2 program dan 12 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada tahun 2022. Adapun capaian penyerapan anggaran kegiatan tahun 2022 adalah 45%. Sedangkan realisasi kinerja untuk semua program/kegiatan dan sub kegiatan tercapai 50 %. Beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2022 serta hambatan dan permasalahan yang terjadi selama realisasi APBD tahun 2022 sampai dengan tri bulan 2 dan tentunya kebijakan / rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan ; nihil
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan ; nihil
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ; nihil
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan ; kinerja semua program,kegiatan dan sub kegiatan telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

- Meningkatkan kualitas perencanaan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu;
 - Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD tahun 2022
 - Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi dilingkup Sekretariat DPRD.
 - Optimalisasi pendayagunaan sumberdaya dan penyusunan program / kegiatan / sub kegiatan.
 - Melakukan koordinasi secara intensif dengan provinsi dan OPD terkait update kebijakan secara terus - menerus

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD
DAN PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun (n-2)2021			Target Program & Kegiatan (Renja Sekretariat DPRD Tahun (n-1)2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Sekretariat DPRD Tahun (n-2)/2021	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)/2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program & Kegiatan s/d Tahun (n-1)/2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROSENTASE RATA - RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	500 %	n/a	100 %	10 % 0	10 0	100 %	100 %	100
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang sesuai	500 %	n/a	100 %	10 % 0	10 0	100 %	100 %	100
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	n/a	3 dokumen	3 dokumen	10 0	3 dokumen	3 dokumen	100
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun	60 Laporan	n/a	12 Laporan	12 Laporan	10 0	12 Laporan	12 Laporan	100

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

			ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	500 %	n/a	100 %	10 % 0	10 % 0	100 %	100 %	100
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang	n/a	31 Orang	31 Orang	10 % 0	31 Orang	31 Orang	100
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	24 bln	n/a	12 bln	12 bln	10 % 0	12 bln	12 bln	100
			Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	200 %	n/a	100 %	10 % 0	10 % 0	100 %	100 %	100
			Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan	Jumlah pegawai peserta bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan	200 orang	n/a	50 orang	50 orang	10 % 0	50 orang	50 orang	100
			Administrasi umum perangkat daerah	Prosentase Pemenuhan pelayanan Administrasi perangkat daerah	200 %	n/a	100 %	10 % 0	10 % 0	100 %	100 %	100
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	100 jenis	n/a	20 jenis	20 jenis	10 % 0	20 jenis	20 jenis	100
			Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor yang tertasilitasi	105 jenis	n/a	21 jenis	21 jenis	10 % 0	21 jenis	21 jenis	100
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang tertasilitasi	85 jenis	n/a	17 jenis	17 jenis	10 % 0	17 jenis	17 jenis	100
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	n/a	1 paket	1 paket	10 % 0	1 paket	1 paket	100
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pemenuhan barang Cetak yang terfasilitasi	50 jenis	n/a	10 jenis	10 jenis	10 % 0	10 jenis	10 jenis	100
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 paket	n/a	10 paket	10 paket	10 % 0	10 paket	10 paket	100
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	n/a	12 laporan	12 laporan	10 % 0	12 laporan	12 laporan	100

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	n/a	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500 %	n/a	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi	10 Jenis	n/a	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	2 Jenis	100
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240 laporan	n/a	48 laporan	48 laporan	100	48 laporan	48 laporan	100
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	300 laporan	n/a	60 laporan	60 laporan	100	60 laporan	60 laporan	100
			Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	500 %	n/a	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	n/a	5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	5 Unit	100
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	195 unit	n/a	39 unit	39 unit	100	39 unit	39 unit	100
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	n/a	1 unit	1 unit	100	20 unit	20 unit	100
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diberikan	500 %	n/a	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan DPRD	250 Orang/Bulan	n/a	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	100	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	100

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	15 Paket	n/a	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	3 Paket	100
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	250 Orang	n/a	50 Orang	50 Orang	100	50 Orang	50 Orang	100
			Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang diberikan	500 %	n/a	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	60 laporan	n/a	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1.IKM	8,31 Indeks	n/a	8,31 Indeks	8,31 Indeks	100	8,31 Indeks	8,31 Indeks	100
				2. IPP	3,00 Indeks	n/a	3,00 Indeks	3,00 Indeks	100	3,00 Indeks	3,00 Indeks	100
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1. Jumlah Raperda Inisiatif yang dihasilkan	15 Dokumen	n/a	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
				2. Jumlah Keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD yang dihasilkan	110 Dokumen	n/a	22 Dokumen	22 Dokumen	100	22 Dokumen	22 Dokumen	100
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen	n/a	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
			Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	45 Dokumen	n/a	9 Dokumen	9 Dokumen	100	9 Dokumen	9 Dokumen	100
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	225 Dokumen	n/a	25 Dokumen	25 Dokumen	100	25 Dokumen	25 Dokumen	100
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	20 Dokumen	n/a	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah layanan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	1666 Layanan	n/a	366 Layanan	366 Layanan	100	366 Layanan	366 Layanan	100

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	30 Dokumen	n/a	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60 Dokumen	n/a	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang ditetapkan	20 orang	n/a	4 orang	4 orang	100	4 orang	4 orang	100
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	40 Orang	n/a	8 Orang	8 Orang	100	8 Orang	8 Orang	100
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	50 Dokumen	n/a	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	10 Dokumen	100
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase serap aspirasi yang terfasilitasi	500 %	n/a	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
				Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5 laporan	n/a	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	10 Dokumen	n/a	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
				Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	750 Dokumen	n/a	150 Dokumen	150 Dokumen	100	150 Dokumen	150 Dokumen	100
				Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase Tugas DPRD yg terfasilitasi	500 %	n/a	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	60 Dokumen	n/a	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	20 Dokumen	n/a	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, maka kemudian diterbitkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, yang menerangkan bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam melakukan urusan Pemerintahan di bidang pemerintahan.

1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD

Kabupaten Jombang meliputi : Sekretaris, Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan, dan Bagian Perundang-Undangan. Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang secara terukur dan berkelanjutan, maka tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekretaris
2. Bagian Umum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Humas, Rumah Tangga dan Protokol
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi
3. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Anggaran
 - b. Sub Bagian Verifikasi
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan
4. Bagian Persidangan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Layanan Aspirasi Masyarakat
 - b. Sub Bagian Rapat dan Risalah
5. Bagian Perundang-Undangan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Perpustakaan
 - b. Sub Bagian Kajian dan Penyusunan Peraturan Perundang -Undangan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun capaian kinerja yang perlu disajikan pada table analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN JOMBANG

NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 (s.d TW II)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai Evaluasi AKIP	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Memuaskan	Memuaskan	Baik	Sangat baik	Proses	Memuaskan	
		BB	BB	BB	BB	A	B	BB	Proses	A	
2	Nilai Indeks	Baik	Baik	Berkualitas	Berkualitas	Berkualitas	Baik	Berkualitas	Proses	Berkualitas	
	Indeks Kepuasan	76.61	78.75	-	-	-	81.93	-	Proses	-	
	Indeks kualitas Pelayanan Publik Sekretariat DPRD	-	-	7.15	7.384	7.50	-	7.80	Proses	7.50	

2. 3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai. Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi Keys of Development Goals bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Secara konkret, Keys of Development Goals di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui rapat koordinasi secara berkala, dalam rangka membangun sinergitas program

dan kegiatan di Sekretariat DPRD. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain :

1. Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Tata kelola di Sekretariat kurang profesional, transparan, akuntabel, dan efektif serta penyelenggaraan pelayanan publik yang belum maksimal.
4. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih secara manual dan kurang efisien
5. Kurangnya inovasi dalam pelayanan di Sekretariat DPRD

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, terdiri atas :

a. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2016 tentang kedudukan ,Susunan Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, siap untuk mendukung pengelolaan program di Sekretariat DPRD.
3. Koordinasi antara Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, Kemendagri, dan Kemenkeu.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang belum mengakomodasi secara optimal pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan outcome, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegiatannya untuk memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang
3. Belum adanya sistem informasi dan database yang terintegrasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta belum tercukupinya SDM yang kompeten dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD.

Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada di luar lingkungan organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah :

a. Faktor Peluang Organisasi

1. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth)
2. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.

b. Faktor Tantangan Organisasi

1. Perubahan paradigma dari pemerintah (Government) menjadi tata pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha / swasta.
2. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu.

3. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, dan daya saingnya.
4. Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD RPJMD, dan RKPD.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2022, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Review Terhadap Rancangan awal RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2023

no	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Keg/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Jombang	PROSENTASE RATA - RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	100%	4 7.124.1 25.064	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Jombang	PROSENTASE RATA - RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	100%	47.124.125.064	
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah</i>	Kab. Jombang	<i>Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang sesuai</i>	100%	4 0.250.0 00	<i>Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah</i>	Kab. Jombang	<i>Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang sesuai</i>	100%	40.250.000	
	<i>Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah</i>	Kab. Jombang	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 dokumen	2 5.700.0 00	<i>Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah</i>	Kab. Jombang	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 dokumen	25.700.000	
	<i>Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	Kab. Jombang	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun</i>	12 laporan	1 4.550.0 00	<i>Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	Kab. Jombang	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun</i>	12 laporan	14.550.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	7 .528.48 6.122	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	7.528.486.122	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab. Jombang	<i>Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	31 orang	7 .212.22 6.122	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab. Jombang	<i>Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	31 orang	7.212.226.122	

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	3 16.260. 000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	316.260.000	
Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Kab. Jombang	Prosentase Pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	4 86.050. 000	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Kab. Jombang	Prosentase Pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	486.050.000	
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan	Kab. Jombang	Jumlah pegawai peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Undangan	50 orang	4 86.050. 000	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan	Kab. Jombang	Jumlah pegawai peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Undangan	50 orang	486.050.000	
Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Jombang	Prosentase Pemenuhan pelayanan Administrasi perangkat daerah	100%	2 .278.91 4.075	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Jombang	Prosentase Pemenuhan pelayanan Administrasi perangkat daerah	100%	2.278.914.075	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Jombang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	20 jenis	2 6.144.9 00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Jombang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	20 jenis	26.144.900	
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Jombang	Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor yang tertasilitasi	21 jenis	1 59.674. 725	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Jombang	Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor yang tertasilitasi	21 jenis	159.674.725	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jombang	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang tertasilitasi	17 jenis	2 1.929.7 50	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jombang	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang tertasilitasi	17 jenis	21.929.750	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 16.732. 000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	116.732.000	
Penyediaan Barang	Kab. Jombang	Jumlah Pemenuhan	10 paket	3	Penyediaan Barang	Kab. Jombang	Jumlah Pemenuhan barang	10 paket	32.416.700	

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Cetakan dan Penggandaan		barang Cetakn yang terfasilitasi		2.416.700	Cetakan dan Penggandaan		Cetakan yang terfasilitasi			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Jombang	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	10 dokumen	75.264.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Jombang	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	10 dokumen	75.264.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	94.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	94.500.000	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1.752.252.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1.752.252.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	823.167.405	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	823.167.405	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang	Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi	2 jenis	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang	Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi	2 jenis	3.500.000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	271.009.980	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	271.009.980	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	548.657.425	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	548.657.425	
Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Jombang	Prosentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100%	980.093.570	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Jombang	Prosentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	980.093.570	

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

		daerah								
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab.Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	2 32.510. 000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab.Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	232.510.000	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab.Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 unit	5 61.340. 000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab.Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 unit	561.340.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Jombang	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 86.243. 570	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Jombang	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	186.243.570	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab.Jombang	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diberikan	100%	3 4.661.7 08.892	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab.Jombang	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diberikan	100%	34.661.708.892	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab.Jombang	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan DPRD	50 orang	3 4.507.0 87.092	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab.Jombang	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan DPRD	50 orang	34.507.087.092	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab.Jombang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 paket	1 11.250. 000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab.Jombang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 paket	111.250.000	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab.Jombang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	4 3.371.8 00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab.Jombang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	43.371.800	
Layanan Administrasi DPRD	Kab.Jombang	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100%	3	Layanan Administrasi DPRD	Kab.Jombang	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang	100%	325.455.000	

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

			<i>yang diberikan</i>		25.455.000			<i>diberikan</i>			
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 laporan	3 25.455.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 laporan	325.455.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab.Jombang	1.IKM	8,31 indeks	2 4.017.320.500	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab.Jombang	1.IKM	8,31 indeks	24.017.320.500	
		Kab.Jombang	2. IPP	3,00 indeks			Kab.Jombang	2. IPP	3,00 indeks		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab.Jombang	1. Jumlah Raperda Inisiatif yang dihasilkan	3 dokumen	3 15.460.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab.Jombang	1. Jumlah Raperda Inisiatif yang dihasilkan	3 dokumen	315.460.000	
		Kab.Jombang	2.Jumlah Keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD yang dihasilkan	22 dokumen			Kab.Jombang	2.Jumlah Keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD yang dihasilkan	22 dokumen		
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 dokumen	6 .100.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 dokumen	6.100.000	
	Pembahasan Rancangan Perda	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 dokumen	5 1.160.000	Pembahasan Rancangan Perda	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 dokumen	51.160.000	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	25 dokumen	3 4.200.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	25 dokumen	34.200.000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau	4 dokumen	2 24.000.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau	4 dokumen	224.000.000	

			Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		000			Naskah Akademik yang Difasilitasi			
Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Jombang	Jumlah layanan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	366 layanan	4	.535.56	5.500	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Jombang	Jumlah layanan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	366 layanan	4.535.565.500
Pendalaman Tugas DPRD	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	3	.496.07	8.000	Pendalaman Tugas DPRD	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	3.496.078.000
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 dokumen	3	67.500.	000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 dokumen	367.500.000
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab.Jombang	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang ditetapkan	4 orang	3	60.000.	000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab.Jombang	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang ditetapkan	4 orang	360.000.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab.Jombang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	2	88.000.	000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab.Jombang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	288.000.000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	10 dokumen	2	3.987.5	00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	10 dokumen	23.987.500
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab.Jombang	Prosentase serap aspirasi yang terfasilitasi	100%	6	16.568.	000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab.Jombang	Prosentase serap aspirasi yang terfasilitasi	100%	616.568.000
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	7	7.298.0	00	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	77.298.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	2 dokumen	6 7.670.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	2 dokumen	67.670.000	
Pelaksanaan Reses	Kab.Jombang	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 dokumen	4 71.600.000	Pelaksanaan Reses	Kab.Jombang	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 dokumen	471.600.000	
Fasilitasi Tugas DPRD	Kab.Jombang	Prosentase Tugas DPRD yg terfasilitasi	100%	1 8.549.727.000	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab.Jombang	Prosentase Tugas DPRD yg terfasilitasi	100%	18.549.727.000	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	1 6.510.467.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	16.510.467.000	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	2 .039.260.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	2.039.260.000	

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 melalui beberapa tahapan. Tahapan awal yaitu Penyusunan Rancangan Awal RENJA Perangkat daerah berpedoman pada RENSTRA Sekretariat DPRD tahun 2018 - 2023 dan tahun berjalan dengan sistematika penyajian berdasarkan Surat Edaran KDH tentang Penyusunan Renja 2023. Setelah dilaksanakannya Forum Perangkat Daerah Renja 2023 dengan tujuan untuk mewadahi usulan – usulan program dan kegiatan maka dilakukan penyempurnaan Rancangan Renja Sekretariat DPRD berdasarkan Berita Acara Forum PD.

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2023 tidak ada usulan dari masyarakat langsung, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, Informasi dari propinsi, karena usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dipilih berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang sesuai dengan permendagri 90 tahun 2019.

Hasil rancangan akhir renja PD kemudian disinkronisasi dengan RKPD melalui desk Bappeda dan disahkan oleh Bupati.

Tabel 2. 4

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Jombang

No	Program/keg/sub keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Jombang	PROSENTASE RATA - RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	100%	47.124.125.064	
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah</i>	Kab. Jombang	<i>Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang sesuai</i>	100%	40.250.000	
	<i>Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah</i>	Kab. Jombang	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>3 dokumen</i>	25.700.000	
	<i>Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	Kab. Jombang	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun</i>	<i>12 laporan</i>	14.550.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	7.528.486.122	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab. Jombang	<i>Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>31 orang</i>	7.212.226.122	
	<i>Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD</i>	Kab. Jombang	<i>Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD</i>	<i>12 bulan</i>	316.260.000	
	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Kab. Jombang	Prosentase Pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	486.050.000	
	<i>Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan</i>	Kab. Jombang	<i>Jumlah pegawai peserta bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan</i>	<i>50 orang</i>	486.050.000	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Jombang	Prosentase Pemenuhan pelayanan Administrasi perangkat daerah	100%	2.278.914.075	
	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	Kab. Jombang	<i>Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia</i>	<i>20 jenis</i>	26.144.900	
	<i>Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor</i>	Kab. Jombang	<i>Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor yang tertasilitasi</i>	<i>21 jenis</i>	159.674.725	
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Kab. Jombang	<i>Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang tertasilitasi</i>	<i>17 jenis</i>	21.929.750	

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	116.732.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Jombang	Jumlah Pemenuhan barang Cetak yang terfasilitasi	10 paket	32.416.700	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kab.Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 dokumen	75.264.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	94.500.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1.752.252.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	823.167.405	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang	Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi	2 jenis	3.500.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	271.009.980	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	548.657.425	
	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Jombang	Prosentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	980.093.570	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab.Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	232.510.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab.Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 unit	561.340.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Jombang	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	186.243.570	

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab.Jombang	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diberikan	100%	34.661.708.892	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab.Jombang	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan DPRD	50 orang	34.507.087.092	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab.Jombang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 paket	111.250.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab.Jombang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	43.371.800	
	Layanan Administrasi DPRD	Kab.Jombang	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang diberikan	100%	325.455.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 laporan	325.455.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab.Jombang	1.IKM	8,31 indeks	24.017.320.500	
		Kab.Jombang	2. IPP	3,00 indeks		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab.Jombang	1. Jumlah Raperda Inisiatif yang dihasilkan	3 dokumen	315.460.000	
		Kab.Jombang	2. Jumlah Keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD yang dihasilkan	22 dokumen		
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 dokumen	6.100.000	
	Pembahasan Rancangan Perda	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 dokumen	51.160.000	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	25 dokumen	34.200.000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 dokumen	224.000.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Jombang	Jumlah layanan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	366 layanan	4.535.565.500	
	Pendalaman Tugas DPRD	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	3.496.078.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 dokumen	367.500.000	

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab.Jombang	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang ditetapkan	4 orang	360.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab.Jombang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	288.000.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	10 dokumen	23.987.500	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab.Jombang	Prosentase serap aspirasi yang terfasilitasi	100%	616.568.000	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab.Jombang	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	77.298.000	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	2 dokumen	67.670.000	
	Pelaksanaan Reses	Kab.Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 dokumen	471.600.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab.Jombang	Prosentase Tugas DPRD yg terfasilitasi	100%	18.549.727.000	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	16.510.467.000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	2.039.260.000	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tidak berbeda dengan Lembaga di atasnya dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang berpegang pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sesuai dengan pasal 420 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur kelembagaan kurang lebih sama dengan Pusat dan Kabupaten Jombang Tipe Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun nomenklatur Sekretariat DPRD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Struktur kelembagaan yang ada pada prinsipnya hampir sama dengan DPR RI maupun DPRD Propinsi Jawa Timur , demikian juga tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD. Tugas pokok tersebut adalah memberkan fasilitasi terhadap agenda yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD. Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun tugas dari Sekretariat DPRD adalah :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
2. Menyiapkan administrasi keuangan
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

4. Menyediakan serta mengkoordinasikan kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan UU MD3, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah sistem pendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Setjen dan Badan Keahlian DPR RI bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Hal ini menyebabkan posisi dan kedudukan Setjendan Badan Keahlian DPR RI tidak sama dengan kementerian/ lembaga yang berada di bawah ranah eksekutif. Perbedaan tersebut dapat terlihat ketika kementerian dapat mengambil peran dalam salah satu bidang pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan, namun untuk Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, peran yang dilakukan adalah mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI sebagai lembaga perwakilan (legislatif) yang merupakan salah satu cabang kekuasaan pemerintahan negara, di samping kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif). Mengingat DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, maka DPR tidak hanya terkait dengan bidang politik, melainkan semua aspek pembangunan, dalam kapasitas sebagai representasi rakyat. Dengan demikian, Renstra Setjen dan Badan Keahlian DPR RI juga perlu memperhatikan Renstra DPR RI. Demikian Juga Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang maupun Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur .

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

3.2.1. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah Mewujudkan sistem pendukung layanan Set. DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) sekretriat DPRD yang pada tahun 2022 targetnya sebesar 7.384.

3.2.2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah :

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator kinerja berupa Nilai Evaluasi AKIP (Nilai Sakip)
2. Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan indikator berupa Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (IKPP) terhadap Sekretariat DPRD (Nilai IKPP)

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Pada Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang merencanakan 2 (dua) program yang dijabarkan dalam 12 (dua belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROSENTASE RATA - RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	Kab. Jombang	100%	47.124.125.064	APBD		100%	47.124.125.064
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah</i>	<i>Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang sesuai</i>	Kab. Jombang	100%	40.250.000	APBD		100%	40.250.000
	<i>Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Jombang	<i>3 dokumen</i>	25.700.000	APBD		<i>3 dokumen</i>	25.700.000
	<i>Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun</i>	Kab. Jombang	<i>12 laporan</i>	14.550.000	APBD		<i>12 laporan</i>	14.550.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Kab. Jombang	100%	7.528.486.122	APBD		100%	7.528.486.122
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab. Jombang	<i>31 orang</i>	7.212.226.122	APBD		<i>31 orang</i>	7.212.226.122
	<i>Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD</i>	Kab. Jombang	<i>12 bulan</i>	316.260.000	APBD		<i>12 bulan</i>	316.260.000
	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Jombang	100%	486.050.000	APBD		100%	486.050.000
	<i>Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Undangan</i>	<i>Jumlah pegawai peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Undangan</i>	Kab. Jombang	<i>50 orang</i>	486.050.000	APBD		<i>50 orang</i>	486.050.000
	Administrasi umum perangkat daerah	Prosentase Pemenuhan pelayanan Administrasi perangkat	Kab. Jombang	100%	2.278.914.075	APBD		100%	2.278.914.075

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

	<i>daerah</i>								
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kab. Jombang	20 jenis	26.144.900	APBD		20 jenis	26.144.900	
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor yang tertasilitasi	Kab. Jombang	21 jenis	159.674.725	APBD		21 jenis	159.674.725	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang tertasilitasi	Kab. Jombang	17 jenis	21.929.750	APBD		17 jenis	21.929.750	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	1 paket	116.732.000	APBD		1 paket	116.732.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pemenuhan barang Cetak yang terfasilitasi	Kab. Jombang	10 paket	32.416.700	APBD		10 paket	32.416.700	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Jombang	10 dokumen	75.264.000	APBD		10 dokumen	75.264.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Jombang	12 laporan	94.500.000	APBD		12 laporan	94.500.000	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	12 laporan	1.752.252.000	APBD		12 laporan	1.752.252.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	100	823.167.405	APBD		100	823.167.405	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi	Kab. Jombang	2 jenis	3.500.000	APBD		2 jenis	3.500.000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Jombang	48 laporan	271.009.980	APBD		48 laporan	271.009.980	

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	60 laporan	548.657.425	APBD		60 laporan	548.657.425
	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Jombang	100%	980.093.570	APBD		100%	980.093.570
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Jombang	5 unit	232.510.000	APBD		5 unit	232.510.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Jombang	39 unit	561.340.000	APBD		39 unit	561.340.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Jombang	1 unit	186.243.570	APBD		1 unit	186.243.570
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diberikan	Kab.Jombang	100%	34.661.708.892	APBD		100%	34.661.708.892
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan DPRD	Kab.Jombang	50 orang	34.507.087.092	APBD		50 orang	34.507.087.092
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kab.Jombang	3 paket	111.250.000	APBD		3 paket	111.250.000
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	Kab.Jombang	50 orang	43.371.800	APBD		50 orang	43.371.800

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

		DPRD							
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang diberikan	Kab.Jombang	100%	325.455.000	APBD		100%	325.455.000
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab.Jombang	12 laporan	325.455.000	APBD		12 laporan	325.455.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. IKM	Kab.Jombang	8,31 indeks	24.017.320.500	APBD		8,31 indeks	24.017.320.500
		2. IPP	Kab.Jombang	3,00 indeks		APBD		3,00 indeks	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1. Jumlah Raperda Inisiatif yang dihasilkan	Kab.Jombang	3 dokumen	315.460.000	APBD		3 dokumen	315.460.000
		2. Jumlah Keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD yang dihasilkan	Kab.Jombang	22 dokumen		APBD		22 dokumen	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Jombang	2 dokumen	6.100.000	APBD		2 dokumen	6.100.000
	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Jombang	9 dokumen	51.160.000	APBD		9 dokumen	51.160.000
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Kab.Jombang	25 dokumen	34.200.000	APBD		25 dokumen	34.200.000
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kab. Jombang	4 dokumen	224.000.000	APBD		4 dokumen	224.000.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah layanan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	Kab. Jombang	366 layanan	4.535.565.500	APBD		366 layanan	4.535.565.500
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman	Kab.Jombang	6 dokumen	3.496.078.000	APBD		6 dokumen	3.496.078.000

		Tugas DPRD							
	<i>Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>	<i>Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>	<i>Kab.Jombang</i>	<i>12 dokumen</i>	<i>367.500.000</i>	<i>APBD</i>		<i>12 dokumen</i>	<i>367.500.000</i>
	<i>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	<i>Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang ditetapkan</i>	<i>Kab.Jombang</i>	<i>4 orang</i>	<i>360.000.000</i>	<i>APBD</i>		<i>4 orang</i>	<i>360.000.000</i>
	<i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>	<i>Kab.Jombang</i>	<i>8 orang</i>	<i>288.000.000</i>	<i>APBD</i>		<i>8 orang</i>	<i>288.000.000</i>
	<i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	<i>Kab.Jombang</i>	<i>10 dokumen</i>	<i>23.987.500</i>	<i>APBD</i>		<i>10 dokumen</i>	<i>23.987.500</i>
	<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	<i>Prosentase serap aspirasi yang terfasilitasi</i>	<i>Kab.Jombang</i>	<i>100%</i>	<i>616.568.000</i>	<i>APBD</i>		<i>100%</i>	<i>616.568.000</i>
	<i>Kunjungan Kerja dalam Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>	<i>Kab.Jombang</i>	<i>1 laporan</i>	<i>77.298.000</i>	<i>APBD</i>		<i>1 laporan</i>	<i>77.298.000</i>
	<i>Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun</i>	<i>Kab.Jombang</i>	<i>2 dokumen</i>	<i>67.670.000</i>	<i>APBD</i>		<i>2 dokumen</i>	<i>67.670.000</i>
	<i>Pelaksanaan Reses</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>	<i>Kab.Jombang</i>	<i>150 dokumen</i>	<i>471.600.000</i>	<i>APBD</i>		<i>150 dokumen</i>	<i>471.600.000</i>
	<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>	<i>Prosentase Tugas DPRD yg terfasilitasi</i>	<i>Kab.Jombang</i>	<i>100%</i>	<i>18.549.727.000</i>	<i>APBD</i>		<i>100%</i>	<i>18.549.727.000</i>
	<i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	<i>Kab. Jombang</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>16.510.467.000</i>	<i>APBD</i>		<i>12 Dokumen</i>	<i>16.510.467.000</i>
	<i>Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>	<i>Kab. Jombang</i>	<i>4 dokumen</i>	<i>2.039.260.000</i>	<i>APBD</i>		<i>4 dokumen</i>	<i>2.039.260.000</i>

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan masyarakat dan dunia usaha yang berisi program / kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD tahun 2023 yang ditinjaulanjuti dengan menyusun kebijakan public baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya daya anggaran.

Keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2023 dan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun TA 2023 agar benar benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, semua perangkat daerah supaya membuat rencana kerja tahun 2023.

Pelaksanaan kegiatan RKPD tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar perangkat daerah. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun jarring aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip safe guarding yaitu ;trasparansi, akuntabilitas, partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip safe guarding bila didukung oleh peran masyarakat luas untuk mengawasi pelaksanaannya sehingga terwujud pembangunan berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil maximal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2023 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 2023 guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Renja ini masih bersifat indikatif maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program - program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Jombang namun juga oleh sumber pendanaan lainnya yaitu APBD Provinsi.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja dalam kurun waktu tahun 2023, sehingga upaya yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu, diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi, karena secara substansi merupakan pencerminan implementasi program dan kegiatan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023. Sangat diharapkan komitmen, kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur dalam mengaktualkan target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Renja OPD ini untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

Jombang, 17 Juli 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JOMBANG



Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19680709 198903 1 007

